

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdul Mun'im Idries, Santoso, & Sidhi. 1979. *Ilmu kedokteran kehakiman*. Gunung Agung, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptartha Jaya, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Duwi Handoko, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Effendi, E. 2014. *Hukum pidana Indonesia: suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, J. 2016. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Gerson Bawengan, 1974, *Pengantar Psychology Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan, dan penerapan KUHAP :Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasan Basri Saanin, 1993, *Psikiater dan Pengadilan (Psikiatri Forensik Indonesia)*, Ghalia, Jakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Normatif*, Yogyakarta.
- Nico Ngani, Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Psikologi Kriminal Dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat.

- Prakoso, Joko, 1986, *Peran Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia.
- Soedjono, 1977, *Ilmu Jiwa Kesehatan (Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan)*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1979, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Bandung
- Suharto, Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan hingga Persidangan*, Jakarta.
- Susanto, I.S, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Syamsudin Rahman, 2011, *Peran Visum Et Repertum di Pengadilan*, Al-Risalan.
- Tengker, F. 2001, *Bab-Bab Hukum Kesehatan*, Penerbit Nova, Bandung.
- Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta.
- W.F.Maramis, 2005, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Wahjadi Darmabrata, Adhi Wibowo Nurhidayat, *Psikiatri Forensik*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Wirdjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana DI Indonesia*, Refika, Bandung.
- Zamhari Abidin, 1986, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

2. JURNAL

- Bikru Imal, Adnil Edwin Nurdin, and Rika Susanti. "Gambaran Pola Gangguan Jiwa pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Dimintakan Visum et Repertum Psikiatri ke RSJ Prof. HB. Saanin Padang Periode 1 Januari 2008–31 Desember 2012." *Jurnal Kesehatan Andalas* 4.2 (2015).
- Dayat Hadijaya, Nikamah Rosidah, and Muhammad Akib. "Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan

- Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 2 (2014).
- Herdaetha, Adriesti. "Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa." *Jurnal Jurisprudence* 5.1 (Maret, 2017)
- Johana Olivia Rumajar, 2014, “Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Vol.III No. 4 (Maret, 2014)
- Muhammad Musa, “Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri”. *Jurnal Masalah Masalah Hukum* Jilid 46 No. 4 (Oktober, 2017)
- Nadeak, Leonardo Hasiholan. "Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 184 KUHAP." *LEX PRIVATUM*, Vol.5, No.4. , (Juni, 2017).
- Nasrudin, Khairu. "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran *Minuman Keras*." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12, No. 4. , (Desember, 2017)
- PJ, Nyoman Serikat, and R. B. Sularto. "Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena *Daya Paksa* dalam Putusan Hakim." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 4, No.1. , (Agustus, 2016)
- Pribadi, Riky, “Tinjauan Yuridis Peranan Alat Bukti Dalam Menangani Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa Manusia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kuhap), *PUBLICITAS Publikasi Ilmiah Civitas Akademika Universitas Majalengka*, Vol 11, (Januari, 2017).
- Sari, Siska Diana."Pentingnya Penguasaan Psikologi Bagi Penyidik Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan." *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 2.1 (2016)
- Sukardi, “Konsep Penyidikan Restorative Justice”, *Jurnal Nestor*, Vol. 8, No.01, (Maret, 2015).

3. ARTIKEL/INTERNET

- Anggoro,Hendy,2015. “*Penerapan Ilmu Psikiatr Kehakiman Dalam Menentukan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana*”. (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)
- Abdul Adzim Irsad, Ilmu Bantu Dalam Hukum Pidana, 2014, <https://www.kompasiana.com/bloggernes/55281d676ea83403378b>

[45a7/ilmu-bantu-dalam-hukum-pidana](#), diakses pada Sabtu, 2 Februari 2019 pada pukul 19.23 WIB.

Hukum Online. “*Siapa Sajakah Penegak Hukum atau Lembaga Penegak Hukum di Indonesia*” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/siapa-sajakah-penegak-hukum-di-indonesia>, diakses pada Selasa, 19 Maret 2019 pada pukul 16.55.

World Health Organisation, 2016, “Mental disorders” <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>, WHO New York Diakses Pada Senin, 7 Januari 2019 pada pukul 16.32 WIB

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Hukum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah